

2026

LKIP BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 2025



KABUPATEN
SUMBA
BARAT DAYA
2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena Rahmat dan karuniaNya, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya akan menyajikan capaian kinerja dalam menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Inspektorat Kabupaten Sumba Barat Daya terhadap keberhasilan dan kegagalan untuk mencapai sasaran dan tujuan dalam mewujudkan Visi Misi Kabupaten Sumba Barat Daya dan juga merupakan sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, bebas dari kolusi, korupsi dan Nepotisme (KKN) dan akan menjadi umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pada tahun berikutnya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya disusun berdasarkan realisasi kinerja yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2025 berisi tentang analisis pencapaian sasaran serta pengukuran atas sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025. Dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025, kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam menyajikan informasi kinerja secara lengkap dan sempurna. Untuk itu semua masukan berupa saran dan kritik konstruktif dari berbagai pihak kami menyambut baik.

Semoga dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya menjadi media informasi tentang pelaksanaan pembangunan dan menjadi bahan evaluasi kinerja demi pencapaian dan kesinambungan pembangunan demi kesejahteraan rakyat dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya dapat melaksanakan tugas secara lebih terarah, tepat sasaran dan memiliki orientasi peningkatan kinerja

Tambolaka, 20 Januari 2026

Pj. Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Sumba Barat Daya,

STEFANUS MALO, S.I.P
Pembina – IV/a
NIP. 19820919 201001 1 017

IKTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan laporan kinerja dimaksudkan untuk mengukur keberhasilan dan strategi pencapaian tujuan dan sasaran strategis berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang terdapat dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025 - 2029, yang termuat dalam Perencanaan dan Perjanjian Kinerja Tahunan. Instrumen pengaturan pelaksanaan evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya terpilih Instrumen pertanggungjawaban tersebut antara lain meliputi perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi/ penilaian, serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggung jawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, tujuan dan sasaran strategis organisasi. Untuk mengukur capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam PK, maka dilakukan pengukuran dan analisis capaian kinerja.

Sasaran Strategis ini memiliki keterkaitan dengan Sasaran Strategis dalam Renstra dan PK Inspektorat Kabupaten Sumba Barat Daya, yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif, dan profesional dengan indikator kinerja.

Adapun capaian sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Realisasi penyerapan anggaran Belanja Langsung pada BPBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. **2.478.105.964,-** atau mencapai **89,50 %** dari total Pagu Belanja Langsung sebesar Rp. **2.768.830.974,-**
2. Realisasi kinerja Tahun 2025 sebesar 89,50% dari target kinerja Tahun 2025 sebesar 90%, sehingga capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya menjadi 100,55% sangat berhasil.
3. Dibandingkan dengan capaian target Tahun 2024 sebesar 81,08% telah terjadi peningkatan skor sebesar 8,42% .

Seperti dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025-2029 menetapkan visi yang ingin dicapai yang berawal dari Visi Kabupaten Sumba Barat Daya "Membangun Desa, Menata Kota". dimana merupakan prioritas pembangunan yang menunjuk pada kondisi yang hendak diwujudkan sepanjang periode 2025-2029, maka amanat yang diemban oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya dari makna terkandung adalah mewujudkan visi secara keseluruhan dan Misi 6 yang berpedoman pada Mewujudkan Kelestarian Lingkungan Hidup melalui Tata Kelola Pemerintahan yang baik (*Good Governance*), Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sebagai bentuk aplikasi dari penyelenggaraan pemerintah yang transparan dan akuntabel.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) memberikan gambaran tentang kinerja penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2025, yang diformulasikan dari hasil kinerja satuan kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya. Hal ini dikarenakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya dibentuk untuk melaksanakan satuan tugas pokok dan fungsinya serta mempertanggung jawabkan program dan kegiatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan (*stake holder*).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2025 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya menginformasikan tugas dan fungsi serta hasil capaian kinerja tahun 2025 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya yang merujuk pada Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2026 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya, Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2025, dan wujud pertanggungjawaban atas Perjanjian Kinerja (PK) yang telah dijanjikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya.

Penyusunan LKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya ini disusun melalui pengukuran data kinerja setelah berakhirnya Tahun Anggaran 2025 yang melibatkan seluruh komponen di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya. Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsinya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya telah menetapkan tujuan dan sasaran utama capaian kinerja pada Tahun 2025 berdasarkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 25 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Membangun Desa, Menata Kota	Mewujudkan Kelestarian Lingkungan Hidup	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dengan mengedepankan pembangunan berwawasan lingkungan	S.7 Meningkatkan kualitas S.8 Menurunnya Risiko Bencana	Menurunnya Risiko Bencana

Adapun capaian sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut :

- a) Capaian indikator dimaksud didukung dengan anggaran sebesar Rp 2.768.830.974,- dengan realisasi sebesar Rp.2.478.105.964,-.
- b) Target capaian indikator sasaran tahun 2025 prosentase sebesar 89,50%.
- c) Dibandingkan dengan capaian target Tahun 2024 sebesar 83,06% terjadi peningkatan di Tahun 2025 prosentase sebesar 6,44%.

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut diatas terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya ke depan, sebagai berikut :

A. Beberapa permasalahan yang timbul dalam pencapaian target kinerja BPBD antara lain :

1. Belum optimalnya perwujudan tata kelola pemerintahan (governance) : bersih transparan, kolaboratif, demokratis, dan akuntabel;
2. Belum optimalnya kualitas SDM yang berdaya saing dan berinovasi;
3. Belum terwujudnya tingkat kesejahteraan masyarakat;
4. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sumba Barat Daya belum optimal;
5. Belum terpenuhinya infrastruktur yang memadai;
6. Pengelolaan dan Penanganan Bencana yang belum optimal.

B. Rencana Tindak Strategis Peningkatan Kinerja

Rencana tindak strategis peningkatan kinerja pada Tahun 2025 yaitu :

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan (governance) : bersih transparan, kolaboratif, demokratis, dan akuntabel;
 2. Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing dan berinovasi;
 3. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat;
 4. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat;
 5. Terpenuhi fasilitas infrastruktur;
 6. Meningkatkan pengelolaan dalam penanganan kebencanaan.
-

DAFTAR ISI

Cover

KATA PENGANTAR..... 1

IKTISAR EKSEKUTIF 2

DAFTAR ISI..... 5

BAB I 6

PENDAHULUAN..... 6

1.1. Latar Belakang..... 6

1.2. Maksud Dan Tujuan 6

1.3. Dasar Hukum 7

1.4. Aspek Strategis Organisasi 7

1.5. Cascading Kinerja 8

1.6. Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi 10

1.7. Aspek Kepegawaian dan Sarana Prasarana..... 14

 Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan, Pangkat dan Golongan Pada BPBD Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025..... 14

 Tabel I.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Pada BPBD Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025..... 15

 Tabel I.3 Daftar Normatif PNS pada BPBD Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025..... 16

 Tabel 1.2 Rekapitulasi Jumlah Aparatur Sipil Negara Pada BPBD Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025 17

 Tabel 1.4 Nilai Aset atau Modal BPBD Kabupaten Sumba Barat Daya..... 18

1.8. Permasalahan Utama (Isu Strategis)..... 19

BAB II 20

PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KERJA 20

2.1. Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya..... 20

 a. Program- Program Prioritas : 21

 b. Program-Program Penunjang:..... 22

2.2. Struktur Program Dan Kegiatan Tahun 2025 22

 Tabel II.1 Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan terkait langsung dengan Pencapaian Sasaran Tahun 2025 22

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2025..... 23

 Tabel II.2 Perjanjian Kinerja 24

 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025 24

 Tabel II.3. Dukungan Anggaran untuk mencapai Sasaran Strategis..... 24

 Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan, Pangkat dan Golongan Pada BPBD Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025..... 28

BAB III..... 40

AKUNTABILITAS KINERJA 40

 Tabel.3.Dukungan Anggaran untuk mencapai Sasaran Strategis 41

3.1. CAPAIAN KINERJA..... 42

 Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja 42

 Tabel III. 2 Capaian Kinerja Tahun 2025 42

3.2. Faktor Pendukung, Hambatan dan Rekomendasi Perbaikan 43

3.3. REALISASI ANGGARAN 43

 Tabel III.3. Realisasi Anggaran Tahun 2025 44

BAB IV..... 45

PENUTUP 45

4.1. KESIMPULAN..... 45

4.2. SARAN 46

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah, yang juga menjadi komponen dari prinsip "good governance" sebagai persyaratan bagi setiap instansi dalam upaya mewujudkan ketercapaian tujuan organisasi. Laporan ini juga menggambarkan kinerja instansi pemerintah melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) khususnya pada aspek/komponen Pelaporan Kinerja.

Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah didasarkan pada Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, bahwa setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan mengelola sumber daya yang dimilikinya. Pertanggungjawaban tersebut disajikan dalam bentuk dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi beserta kewenangan pengelolaan sumber daya sebagai bentuk pelaporan pertanggungjawaban kinerja selama kurun waktu satu tahun anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi Pemerintah. LKIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance. Dalam perspektif yang lebih luas maka LKIP berfungsi sebagai media pelaporan pertanggungjawaban kepada publik.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya menyusun LKIP yang berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2. Maksud Dan Tujuan

Penyusunan LKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025 dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja dalam satu tahun anggaran dikaitkan dengan proses pencapaian indikator kinerja utama kepala perangkat daerah yang telah ditetapkan pada Tahun 2025. Sedangkan tujuannya yaitu untuk menyampaikan informasi yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sehingga dapat menjadi acuan dalam upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja organisasi. Adapun tujuan LKIP ini diharapkan dapat bermanfaat dalam rangka :

1. Meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan akuntabel serta mendorong tercapainya good governance;
 2. Sebagai bahan evaluasi dan masukan untuk penyempurnaan dokumen perencanaan yang akan datang;
 3. Mengetahui segala permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program serta kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya;
 4. Sebagai laporan pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan rencana strategis;
 5. Sebagai bahan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan dalam dokumen perencanaan yang akan datang.
-

1.3. Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam menyusun LKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025 ini, sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerinta Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya;
13. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025- 2045;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2025;
16. Peraturan Bupati Sumba Barat Daya Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2025;
17. Peraturan Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya

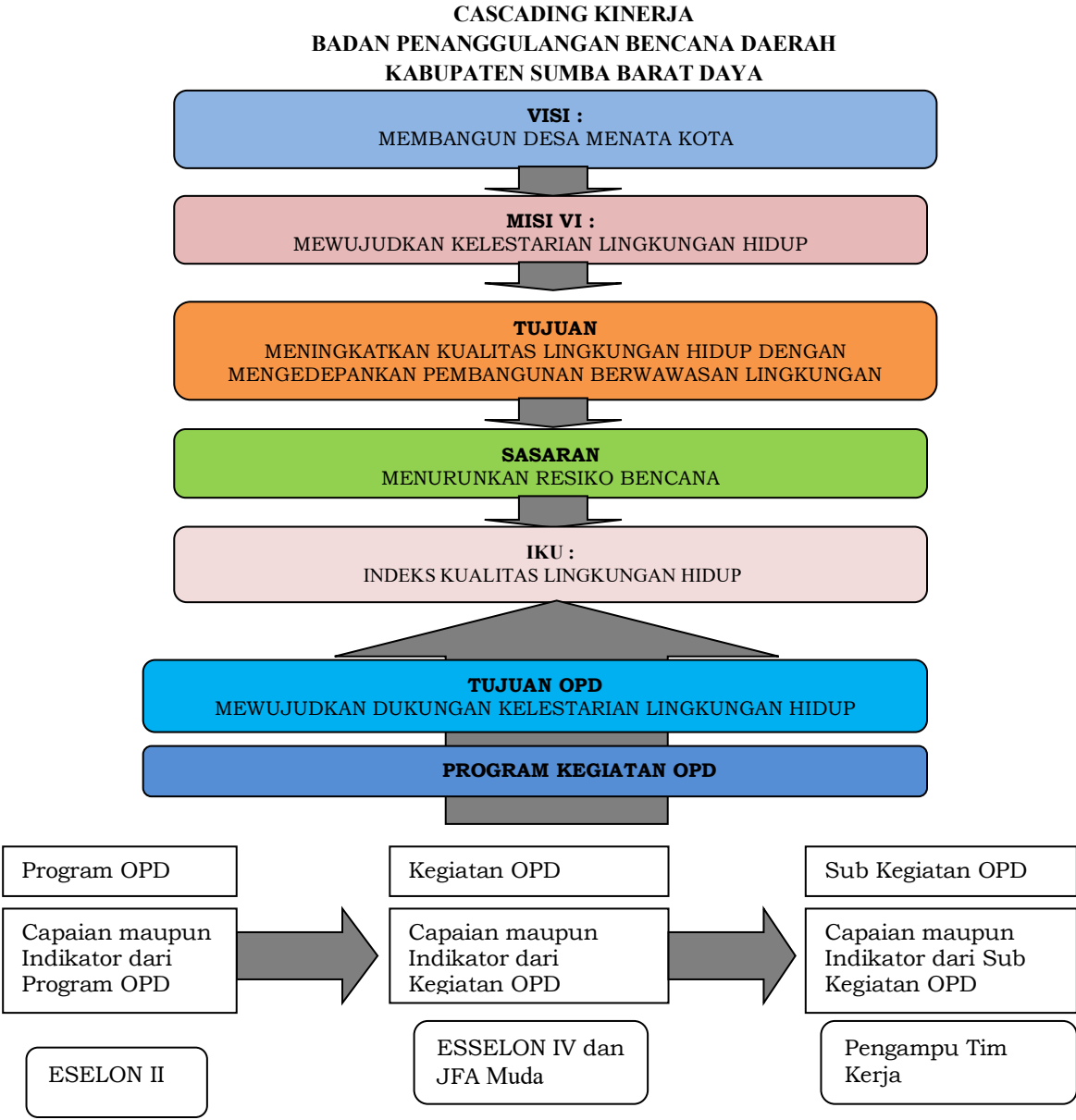
1.4. Aspek Strategis Organisasi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya sebagai unsur penunjang urusan pemerintah dalam pengelolaan, pencegahan dan penanganan darurat dan pasca bencana yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati, yang

melaksanakan fungsi penanggulangan bencana dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran. Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya sebagai badan yang melaksanakan berbagai program dan kegiatan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Selanjutnya komitmen Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya untuk meningkatkan kinerja institusi yang inklusif, transparan dan akuntabel, diharapkan dapat menularkan karakteristik serupa dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Sumba Barat Daya, seiring dengan peran sentralnya dalam proses penanggulangan bencana.

1.5. Cascading Kinerja

Dalam rangka mendorong implementasi organisasi berbasis kinerja (Performance Based Organization) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya, diharapkan agar setiap Organisasi Perangkat Daerah memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Sebagai tindak lanjut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya telah menyusun cascading kinerja. Dimana cascading kinerja ini merupakan proses penjabaran dan penyelarasan Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU), dan/atau target IKU secara vertikal (vertical alignment), dari atas ke bawah dengan memperhatikan tugas dan tanggung jawab dari setiap jabatan. Adapun skema cascading kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya sebagai berikut :



Gambar 1.1
Konsep Cascading Kinerja BPBD Kabupaten Sumba Barat Daya
Tahun 2025

1.6. Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya mempunyai tugas membantu Bupati melakukan pengkoordinasian perumusan dan penetapan kebijakan, sasaran, perencanaan, pembinaan, pengarahan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi dan pelaporan agar penyelenggaraan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melakukan pelaksanaan urusan kebencanaan dapat memperoleh hasil yang efektif, efisien dan akuntabel. Hal ini termuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya. Untuk melaksanakan tugasnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya mempunyai fungsi sebagai berikut :

Aspek Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya sebagaimana tercantum dalam Perda No 10 Tahun 2009 di atas adalah sebagai berikut :

1. Tugas dan Fungsi

a. Tugas :

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya memiliki tugas utama dalam Penanggulangan bencana dengan misi tugas kemanusiaan melalui penanganan program/ kegiatan sebagai berikut :

- 1) Pra Bencana
- 2) Saat Bencana/ Tanggap Darurat
- 3) Pasca Bencana

b. Fungsi :

- 1) Koordinasi merupakan fungsi pengorganisasian tugas BPBD yang dilaksanakan melalui koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, lembaga usaha, dan atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana, saat bencana dan pasca bencana;
- 2) Komando, merupakan fungsi perintah/ gerakan yang terorganisir oleh Unsur Pelaksana BPBD yang dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan bencana yang terjadi di daerah;
- 3) Fasilitasi, merupakan fungsi pengendalian oleh BPBD yang dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Struktur Organisasi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang secara *ex-Officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah. Secara koordinatif, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya dibantu oleh unsur pengarah yang diisi oleh instansi profesional/ ahli dan unsur pelaksana yaitu Kepala Pelaksana. Sedangkan secara komando teknis, Kepala Pelaksana dibantu oleh :

1) Sekretaris, dibantu oleh 3 Kasubbag yaitu :

- a) Kasubbag Umum Dan Kepegawaian;
- b) Kasubbag Program Data Dan Evaluasi;

- c) Kasubbag Keuangan.
- 2) Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, dibantu oleh 2 Seksi yaitu :
 - a) Seksi Pencegahan;
 - b) Seksi Kesiapsiagaan.
- 3) Kepala Bidang Penanganan Darurat dan Logistik, dibantu oleh 2 Seksi yaitu :
 - a) Seksi Kedaruratan;
 - b) Seksi Logistik dan Peralatan.
- 4) Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, dibantu oleh 2 Seksi yaitu :
 - a) Seksi Rehabilitasi Rekonstruksi;
 - b) Seksi Rekonstruksi.

3. Uraian Tugas dan Fungsi :

➤ **Kepala Pelaksana**

Membantu Kepala Badan Dalam Penyelenggaraan Kegiatan Penanggulangan Bencana secara terintegrasi meliputi Prabencana, Saat Tanggap Darurat Dan Pasca Bencana;

➤ **Sekretaris**

Melaksanakan Kebijakan Pelayanan Administrasi kepada semua unsur dilingkungan Badan Meliputi Pengelolaan Administrasi umum, perencanaan, Kepegawaian, Rumah Tangga dan Administrasi Keuangan Dan Aset.

1. **Kepala Sub Bagian Program Data Dan Evaluasi**

Melakukan Penyiapan Bahan Perumusan Kebijakan, Koordinasi Dan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi Dan Pelaporan Dibidang Program Data Dan Evaluasi;

2. **Kepala Sub Bagian Keuangan**

Melakukan Penyiapan Bahan Perumusan Kebijakan, Koordinasi Dan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi Dan Pelaporan di Bidang Keuangan Dan Aset.

3. **Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Merencanakan, Melaksanakan, Mengevaluasi Dan Melaporkan Pelaksanaan Tugas Pelayanan Tugas Administrasi Umum Dan Kerumahtanggaan Serta Administrasi Kepegawaian.

➤ **Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan**

Membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan Kebijakan dibidang Pencegahan, Mitigasi, Dan Kesiapsiagaan pada Prabencana serta Pemberdayaan Masyarakat.

1. **Kepala Seksi Pencegahan**

Membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan Kebijakan dibidang Pencegahan, Mitigasi, Dan Kesiapsiagaan pada Prabencana serta Pemberdayaan Masyarakat.

2. **Kepala Seksi Kesiapsiagaan**

Melakukan Penyiapan Bahan Perumusan Kebijakan, Koordinasi Dan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi

Dan Pelaporan di Seksi Kesiapsiagaan pada saat Prabencana.

➤ **Kepala Bidang Penanganan Darurat Dan Logistik**

Membantu Kepala Pelaksana Dalam Mengkoordinasikan dan Melaksanakan Bidang Penanganan Darurat Dan Logistik.

1. Kepala Seksi Kedaruratan

Membantu Kepala Pelaksana Dalam Mengkoordinasikan Dan Melaksanakan Kebijakan Penanggulangan Bencana pada Seksi Kedaruratan.

2. Kepala Seksi Logistik dan Peralatan

Membantu Kepala Pelaksana Dalam Mengkoordinasikan dan melaksanakan Kebijakan Penanggulangan Bencana Pada Seksi Logistik dan Peralatan.

➤ **Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi**

Melaksanakan Penyusunan Dan Pelaksanaan Kebijakan, Pemberian Pendampingan Serta Pemantauan Dan Evaluasi Bidang Rehabilitasi Dan Rekonstruksi.

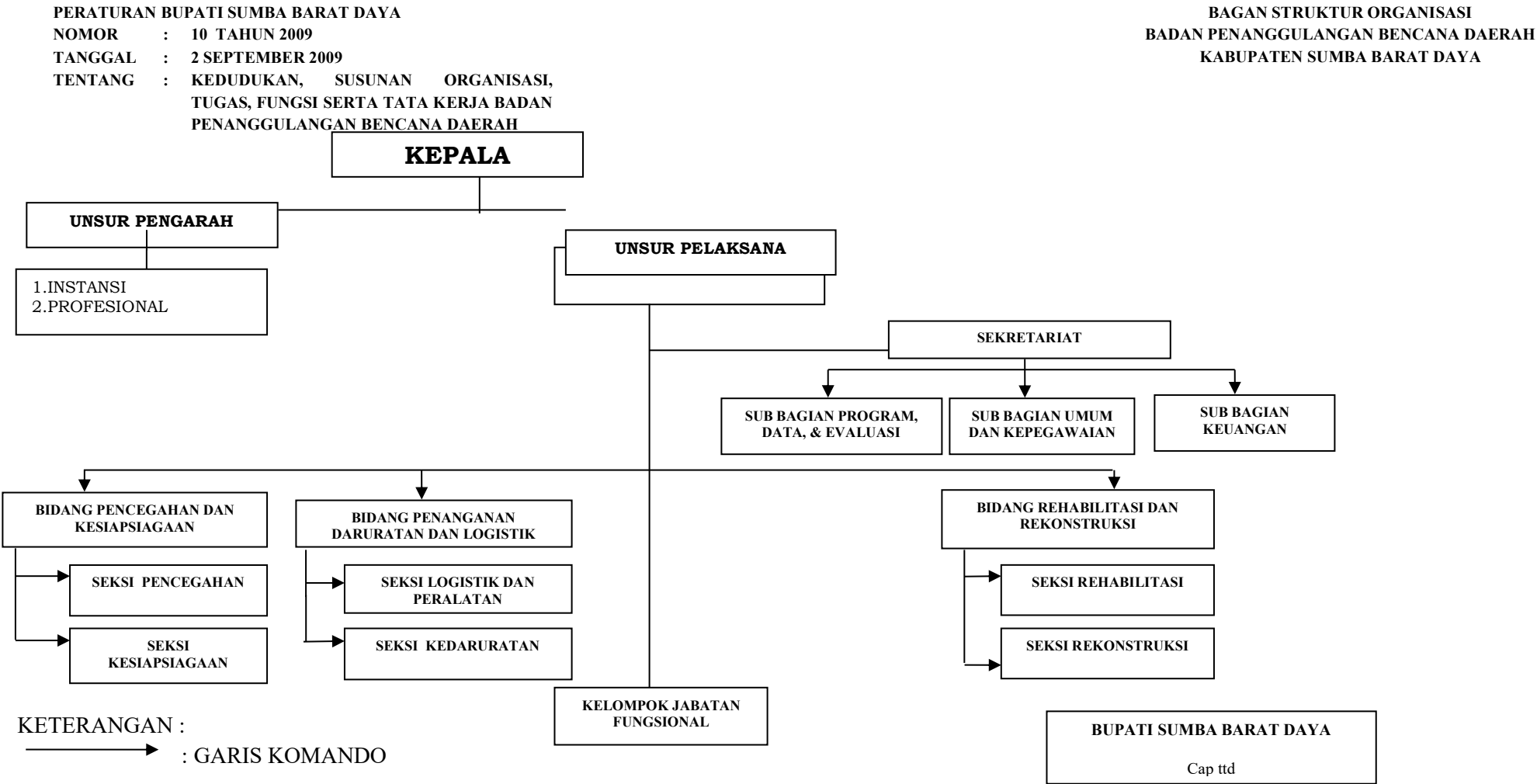
1. Kepala Seksi Rehabilitasi

Mengkoordinasikan Dan Melaksanakan Kebijakan Seksi Rehabilitasi Pada Saat Pasca Bencana.

2. Kepala Seksi Rekonstruksi

Mengkoordinasikan Dan Melaksanakan Kebijakan Seksi Rekonstruksi Pada Saat Pasca Bencana.

Gambar 1.3. Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Sumba Barat Daya



1.7. Aspek Kepegawaian dan Sarana Prasarana

Pada Tahun 2025 jumlah Pegawai Negeri Sipil Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya berjumlah 27 orang. Rincian Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya berdasarkan jabatan, pangkat dan golongan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan, Pangkat dan Golongan Pada BPBD Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025

No.	Jabatan	Pangkat/Gol.	Jumlah (Orang)
1	Kepala Pelaksana	Pembina Utama Muda - IV/c	1
2	Sekretaris	Pembina - IV/a	1
3	Kepala Bidang Rehabilitasi Dan Rekonstruksi	Pembina – IV/a	1
4	Kepala Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan	Penata Tk.I – III/d	1
5	Kepala Bidang Penanganan Darurat Dan Logistik	Penata Tk.I – III/d	1
6	Kepala Sub Bagian Keuangan	Penata Tk.I – III/d	1
7	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Penata Tk.I – III/d	1
8	Kepala Sub Bagian Program Dan Dan Evaluasi	Penata Tk.I – III/d	1
9	Kepala Seksi Pencegahan	Penata - III/c	1
10	Kepala Seksi Kesiapsiagaan	Penata Tk. I - III/d	1
11	Kepala Seksi Kedaruratan	Penata Tk. I - III/d	1
12	Kepala Seksi Logistik dan peralatan	Penata - III/c	1
13	Kepala Seksi Rehabilitasi	-	0
14	Kepala Seksi Rekonstruksi	Penata - III/c	1
15	Analisis Mitigasi Bencana	Penata Muda – III/a	1
16	Penyuluh Bencana	Penata Muda – III/a	1
17	Bendahara Pengeluaran	Penata Muda Tk.I –	1
18	Verifikator Keuangan	Penata Muda Tk.I –	1
19	Teknik Tata Bangunan Dan Perumahan	Pengatur Tk.I - II/d	2
20	Teknik Tata Bangunan Dan Perumahan	Pengatur – II/c	1



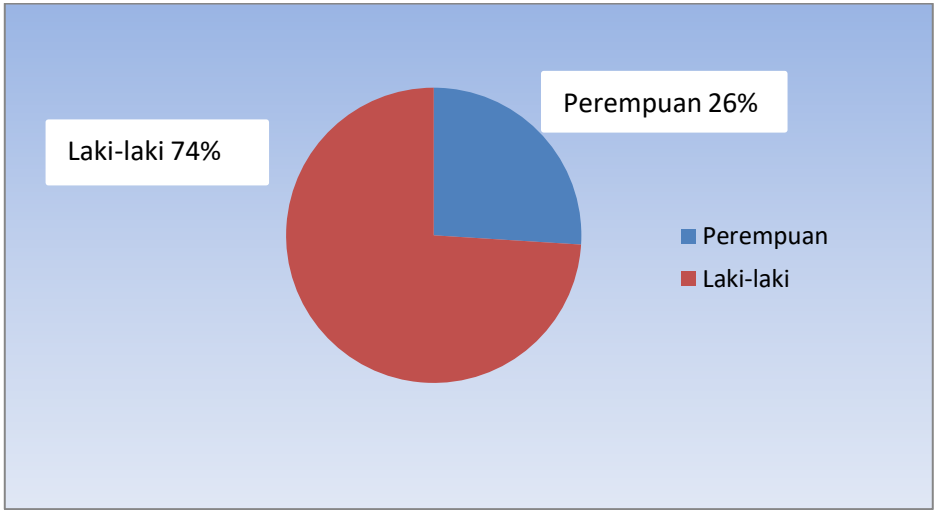
21.	Penata Lasana bangunan Gedung dan Kawasan Pemukiman Terampil		
22	Penata Layanan Operasional	IX	2
23	Operator Layanan Operasional	V	3
JUMLAH			27 ORANG

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari jumlah 27 orang ASN, golongan IV berjumlah 3 orang, golongan III berjumlah 14 orang dan golongan II berjumlah 5 orang dan 5 orang PPPK. Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel I.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Pada BPBD Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		L	P	
1	SMA	4	0	4
2	D-3	6	4	10
3	S1	10	3	13
4	S2	0	0	0
TOTAL		20	7	27

Grafik Jenis Kelamin



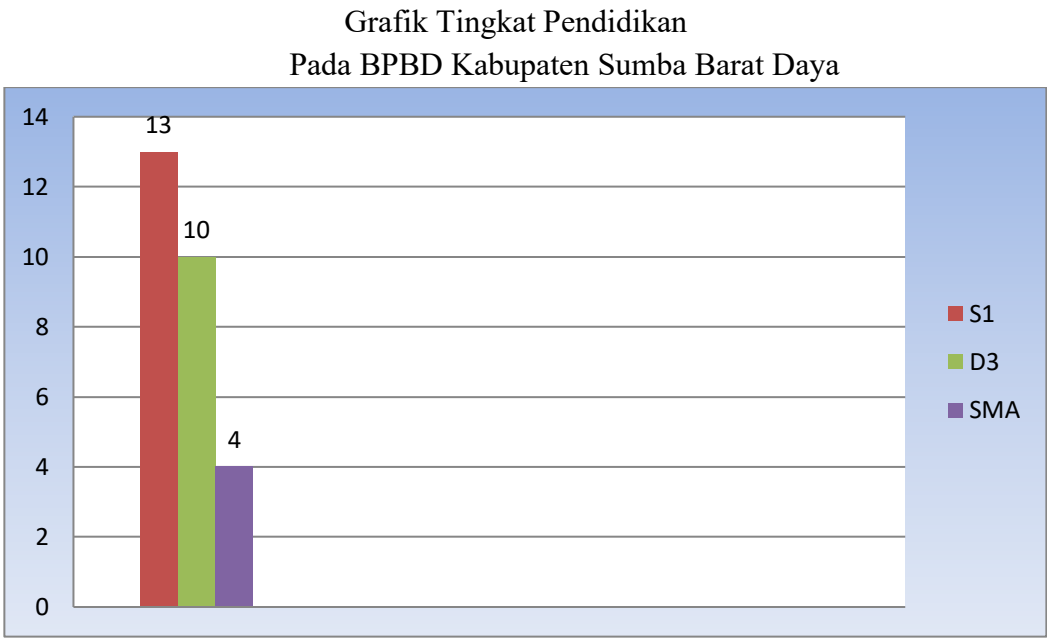
Gambar 1.3. Komposisi Aparatur Sipil Negara Pada BPBD Kabupaten Sumba Barat Daya Kabupaten Sumba Barat Daya Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025

Dari jumlah tersebut pegawai yang berpendidikan S1 berjumlah 13 orang, D3 berjumlah 10 orang dan SMA berjumlah 4 orang. Susunan kepegawaian pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel I.3 Daftar Normatif PNS pada BPBD Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025

NO	NAMA	PANGKAT/GOL.	PENDIDIKAN
1	SAMUEL BORO, ST	PEMBINA UTAMA MUDA - IV/c	S1
2	FRANS NICOLAS BORA	PEMBINA -IV/a	SMA
3	PANKRASIUS APIN, S.Kom	PEMBINA -IV/a	S1
4	YUSTINUS SUDI LERO, A.Md	PENATA Tk.I- III/d	D3
5	BROMLEY RUDOLF TAKO, S.IP	PENATA Tk.I- III/d	S1
6	DOMINGGUS PANDANGO,A.Md	PENATA Tk.I- III/d	D3
7	NAEMA HELENA ZOGARA, S.Pt	PENATA Tk.I- III/d	S1
8	JEFRI DANGGA LOMA, S.Pt	PENATA Tk.I- III/d	S1
9	BINTARI SETYORINI, SE	PENATA Tk.I- III/d	S1
10	OBED SESI MILLA, ST	PENATA Tk.I- III/d	S1
11	JANUARIUS NIGA, A.Md	PENATA - III/c	D3
12	MATEUS PAULUS KAKA, S.Pt	PENATA - III/c	S1
13	MATHIUS UMBU TARA NAPU, SE	PENATA - III/c	S1
14	MARGARETHA TANGGU SOLO, A.Md	PENATA MUDA Tk.I-	D3
15	OLFIANA DAPATAKA, A.Md	PENATA MUDA Tk.I-	D3
16	VICTOR BARNABAS BULU, S.T	PENATA MUDA - III/a	S1
17	MELKIANUS ERIKH BILI, S.T	PENATA MUDA - III/a	S1
18	MARIA REGINA LONGA TURU, A.Md	PENGATUR Tk.I –II/d	D3
19	SOLEMAN JOHANIS FRARE, A.Md	PENGATUR Tk.I –II/d	D3
20	GERSON BILI TANGGELA NDAMANUNA, A.Md	PENGATUR – II/c	D3
21	RITCHEL GIOVANNI FERNANDES, A.Md T	PENGATUR – II/c	D3
22	JENI SUSANTI BONU KULLA, A.Md T	PENGATUR – II/c	D3
23	PAULINA INA KII, SP	IX	S1
24	MAYORET ADRIAN TAEKO, S.Pd	IX	S1
25	MAXIMILIANUS UMBU DETA	V	SMA
26	MELKIANUS UMBU KALEKA	V	SMA
27	YOHANES KAKO LODO	V	SMA





Gambar 1.4 Tingkat Pendidikan

**Tabel 1.2 Rekapitulasi Jumlah Aparatur Sipil Negara Pada BPBD
Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025**

No.	Unit Kerja	Esselon II	Esselon III	Esselon IV	Pelaksana/ Fungsional Umum	Jumlah
1	Kepala Pelaksana	1				1
2	Sekretaris		1	3	7	11
3	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan		1	2	1	4
4	Biadang Penanganan Darurat dan Logistik		1	2	1	4
5	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstrksi		1	1	5	7

Guna mendukung tugas dan fungsi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya memiliki sarana dan prasarana yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1.4 Nilai Aset atau Modal BPBD Kabupaten Sumba Barat Daya

No.	Uraian	Nilai (Rp)	Keterangan
Aser Tetap :			
1	Tanah		Milik Pemda
2	Peralatan dan Mesin	3.131.871.037,00	
3	Bangunan Gedung	1.400.491.000,00	Hibah dari BNPB
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	26.650.000,00	
5	Penyusutan Aset Tetap	(2.988.980.857,00)	
	Jumlah Aset Tetap	1.570.031.180,00	
Aset Lainnya		0,00	
Total Aset		1.570.031.180,00	

Sumber pembiayaan yang dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya bersumber pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumba Barat Daya. Anggaran 2025 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.5
Anggaran Tahun 2025 BPBD Kabupaten Sumba Barat Daya

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	%
PENDAPATAN	-	-	-
BELANJA OPERASI	2.723.830.974,00	2.433.105.964,00	89,50
Belanja Pegawai	1.496.342.178	1.373.126.429	89,33
Belanja Barang dan Jasa	1.227.488.796	1.059.979.535	86,35
BELANJA MODAL	45.000.000	45.000.000	100
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	45.000.000	45.000.000	100
JUMLAH BELANJA	2.768.830.974	2.478.105.964	89,50
SURPLUS	-	-	-
PEMBIAYAAN	-	-	-

1.8. Permasalahan Utama (Isu Strategis)

Isu strategis pada Tahun 2025 menjadi kondisi yang sangat penting dalam menyusun prioritas pembangunan Tahun 2025 untuk merespon kebijakan dalam RPJMD Kabupaten Badan Sumba Barat Daya Tahun 2025-2029. Sebagaimana esensi dari tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten, yaitu dalam penetapan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha Penanggulangan Bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara, Sehingga dapat merumuskan strategi berdasarkan prioritas pembangunan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.

Permasalahan utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya yaitu merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang rawan terhadap bencana, antara lain; tanah longsor, banjir, gempa bumi, cuaca ekstrem, kebakaran hutan, kekeringan dan kebakaran. Dari sisi eksternal, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya dihadapkan pada berbagai permasalahan dan tantangan, diantaranya pencapaian target Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana dan Sub Urusan Kebakaran, yang wajib dilaksanakan dan diterima oleh warga negara di wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya dan menjadi tanggung jawab Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya.

Selain tantangan dan permasalahan diatas, terdapat beberapa isu penting berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya yaitu :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
 2. Memperkuat kapasitas personil, sumber daya, dan kelembagaan penanggulangan bencana;
 3. Memperkuat tata kelola kedaruratan dan logistik;
 4. Meningkatkan sistem kesiapsiagaan bencana;
 5. Meningkatkan kerja sama dengan Bappeda untuk sinkronisasi program dan anggaran; dan
 6. Memperkuat kerja sama dalam pengembangan teknologi dan inovasi
-

BAB II

PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KERJA

Perencanaan Strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya. Perencanaan Strategis merupakan proses sistimatis yang mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan yang berkelanjutan dari pengambilan keputusan yang beresiko tentang masa depan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya telah menyusun rencana strategik yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu Lima tahun, yaitu periode 2025 – 2029 dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin terjadi.

RENSTRA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025 – 2029 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati Sumba Barat Daya yang penyusunannya berpedoman pada RPD Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025 – 2029.

Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran, tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya.

Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator kinerja. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis.

Secara Umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya dapat melaksanakan tugas dan fungsi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPD Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025 – 2029.

Telah ditetapkan 1 sasaran dengan 2 indikator kinerja (*out comes*), sebagaimana tertuang pada Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025 – 2029.

2.1. Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025 - 2029 merupakan penjabaran lebih lanjut dari visi, misi dan agenda Kepala Daerah.

Penyusunan RENSTRA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025 – 2029 ini tentunya tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan pada periode waktu sebelumnya dari berbagai rangkaian dan periodisasi ke pimpinan daerah sesuai dengan penekanan dan tema yang didasarkan pada berbagai perspektif, kondisi dan perkembangan pembangunan saat itu. Untuk itulah maka

penyusunan RPD Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025 – 2029 disusun dengan strategi keberlanjutan yaitu dengan prinsip tetap memperhatikan program-program pembangunan yang telah dilaksanakan pada periode kepemimpinan sebelumnya yang telah memberikan sejumlah hasil dan capaian pembangunan kesejahteraan bagi masyarakat.

18. Pernyataan Visi dan Misi

a. Visi

Sesuai amanat Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 150 ayat 3 (tiga) huruf b bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu lima tahun merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah. Mengacu pada Visi Kabupaten Sumba Barat Daya yaitu **“MEMBANGUN DESA MENATA KOTA”** dan Misi ke 6 Kabupaten Sumba Barat Daya yaitu Mewujudkan Kelestarian Lingkungan Hidup.

Hal ini sejalan dengan Prioritas Program yang ingin dicapai oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya antara lain :

- a) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
- b) Program Penanggulangan Bencana.

b. Misi

Berdasarkan Visi Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya tersebut, maka misi yang diemban oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif, dan professional.

2. Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun kedepan sebagai penjabaran visi dan misi Kabupaten Sumba Barat Daya yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya mewujudkan visi dan misi.

Tujuan yang ingin dicapai melalui pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya adalah meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan sistem informasi daerah.

b. Sasaran

Sasaran merupakan fokus dari tujuan, maka sasaran dari Inspektorat Kabupaten Sumba Barat Daya adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya birokrasi yang akuntabel, inovatif, dan profesional

Program Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya adalah sebagai berikut :

a. Program- Program Prioritas :

1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Kegiatan :

- Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/ Kota.

2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kegiatan :

- a. Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/ Kota;
- b. Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/ Kota.

3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kegiatan :

- a. Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/ Kota;
 - b. Pencarian, pertolongan dan Evaluasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota;
 - c. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/ Kota.
-

b. Program-Program Penunjang:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan :
- a. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;

c. Administrasi Umum Perangkat Daerah;

d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;

e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

2.2. Struktur Program Dan Kegiatan Tahun 2025

Struktur program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya tahun 2025 maupun program dan kegiatan pendukung sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.1 Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan terkait langsung dengan Pencapaian Sasaran Tahun 2025

PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU APBD Perubahan(Rp)	Jumlah Belanja (Rp)	Realsiasi (%)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	1.893.950.074,00	1.760.031.528,00	92,93%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	27.634.250,00	27.634.250,00	100%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.460.250,00	15.460.250,00	100%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	12.174.000,00	12.174.000,00	100%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.543.312.178,00	1.418.196.429,00	91,89%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.496.342.178,00	1.373.126.429,00	91,76%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	46.970.000,00	45.070.000,00	95,95%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	115.173.850,00	114.889.715,00	99,75%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	17.058.500,00	17.058.500,00	100%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	57.938.600,00	57.938.600,00	100%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40.176.750,00	39.892.615,00	99,29%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	67.922.496,00	67.712.424,00	99,69%

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11.916.000,00	11.706.000,00	98,23%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	56.006.496,00	56.006.424,00	99,99%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	139.907.300,00	131.598.710,00	94,06%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	124.907.300,00	119.898.710,00	95,99%
Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	15.000.000,00	11.700.000,00	78%
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	874.880.900,00	718.074.436,00	82,07%
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota	69.858.000,00	0,00	0%
Penyusunan Kajian Risiko Bencana	69.858.000,00	0,00	0%
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	415.912.900,00	331.961.478,00	79,81%
Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/ Kota	46.514.000,00	41.030.528,00	88,21%
Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/ Kota	58.452.000,00	0,00	0%
Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/ Kota	310.946.900,00	290.930.950,00	93,56%
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	285.766.500,00	283.710.244,00	99,28%
Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/ Kota	12.250.000,00	12.115.000,00	98,89%
Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	22.412.000,00	22.407.000,00	99,97%
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/ kota	0,00	0,00	0%
Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	251.104.500,00	249.188.244,00	99,23%
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	103.343.500,00	102.402.714,00	99,08%
Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	21.225.000,00	21.090.000,00	99,36%
Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Reabilitas dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	47.618.000,00	46.954.528,00	98,60%

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kerjanya. Adapun Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya yang merepresentasikan kinerja instansi dengan Ibu

Bupati Sumba Barat Daya sebagai berikut :

Tabel II.2 Perjanjian Kinerja
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumba Barat
Daya Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dengan mengedepankan pembangunan berwawasan lingkungan	Menurunnya Risiko Bencana	100%

Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut diatas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut :

Tabel II.3. Dukungan Anggaran untuk mencapai Sasaran Strategis

PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	1.893.950.074,00
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	27.634.250,00
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.543.312.178,00
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	115.173.850,00
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	67.922.496,00
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	139.907.300,00
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	874.880.900,00
Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota	69.858.000,00
Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	415.912.900,00
Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	285.766.500,00

1.2 Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi

Hubungan antara mandat kinerja, peta proses bisnis dan desain Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana tersaji dalam gambar berikut :

Gambar 1.2 Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur BPBD Kabupaten Sumba Barat Daya

Matrik Antara Mandat dengan Proses Bisnis	
BPBD KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA	
Visi	Membangun Desa, Menata Kota
Misi 6	Mewujudkan Kelestarian Lingkungan hidup
Tujuan	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dengan mengedepankan pembangunan berwawasan lingkungan
Sasaran	Menurunkan Resiko Bencana" Meningkatnya Ketangguhan Daerah dalam Penanggulangan Bencana"
Program OPD	1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota 2. Program Penanggulangan Bencana
Kegiatan OPD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - Administrasi Umum Perangkat Daerah - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Program Penanggulangan Bencana - Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana - Penataan Sistem Dasar Penanggulanana Bencana

1.3 Tugas Fungsi dan Peta Jabatan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya mempunyai tugas membantu Bupati melakukan pengkoordinasian perumusan dan penetapan kebijakan, sasaran, perencanaan, pembinaan, pengarahan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi dan pelaporan agar penyelenggaraan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melakukan pelaksanaan urusan kebencanaan dapat memperoleh hasil yang efektif, efisien dan akuntabel. Hal ini termuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya. Untuk melaksanakan tugasnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya mempunyai fungsi sebagai berikut :

Aspek Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya sebagaimana tercantum dalam Perda No 10 Tahun 2009 di atas adalah sebagai berikut :

c. Tugas BPBD mempunyai tugas yaitu :

- 1) Menetapkan pedoman dan pengerahan terhadap penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara sesuai kebijakan Pemerintah Daerah dan BPBD Provinsi serta BNPB;
- 2) Menyusun standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- 3) Menyusun, menetapkan dan menginventarisasikan peta rawan bencana;
- 4) Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- 5) Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- 6) Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- 7) Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBD atau sumber-sumber lainnya yang syah dan bersifat tidak mengikat;
- 8) Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

d. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas tersebut, BPBD Kabupaten Sumba Barat Daya menyelenggarakan fungsi yaitu :

- 1) Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
 - 2) Pengkoordinasian pelaksanaan Penanggulangan Bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.
-

Gambar 1.3. Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Sumba Barat Daya

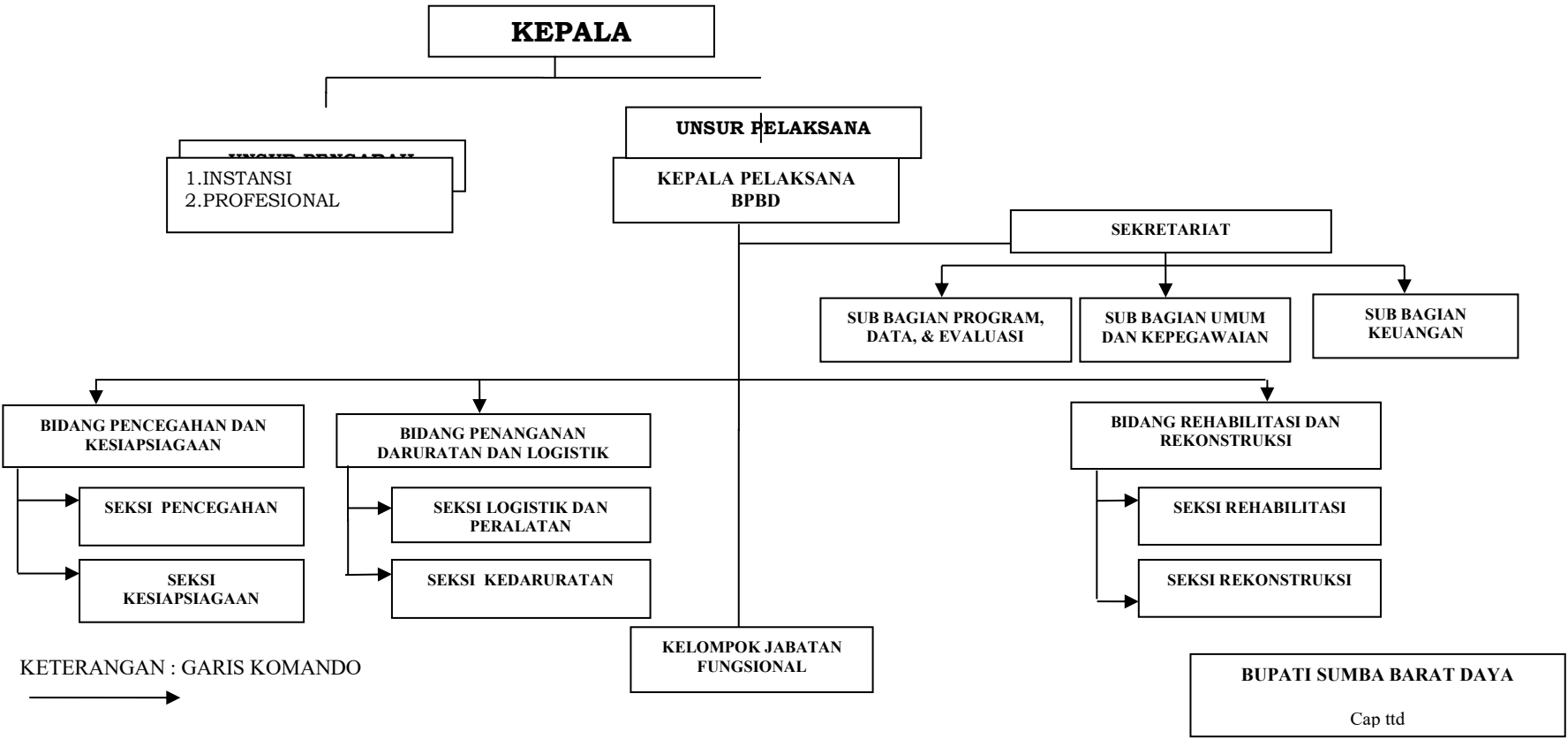
PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT DAYA

NOMOR : 10 TAHUN 2009

TANGGAL : 2 SEPTEMBER 2009

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS, FUNGSI SERTA TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA



1.4 Isu-isu strategis

Berdasarkan analisa faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu mengenali dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu Strategis yang melingkupi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya antara lain :

- 1. Belum optimalnya perwujudan tata kelola pemerintahan (governance) : bersih, transparan, kolaborasi, demokratis, dan akuntabel;
- 2. Belum optimalnya kualitas SDM yang berdaya saing dan berinovasi;
- 3. Belum terwujudnya tingkat kesejahteraan masyarakat;
- 4. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sumba Barat Daya belum optimal;
- 5. Belum terpenuhinya infrastruktur yang memadai;
- 6. Pengelolaan dan Penanganan Bencana yang belum optimal.

1.5 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran

Pada Tahun 2025 jumlah Pegawai Negeri Sipil Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya berjumlah 27 orang. Rincian Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya berdasarkan jabatan, pangkat dan golongan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan, Pangkat dan Golongan Pada BPBD Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025

No.	Jabatan	Pangkat/Gol.	Jumlah (Orang)
1	Kepala Pelaksana	Pembina Utama Muda - IV/c	1
2	Sekretaris	Pembina - IV/a	1
3	Kepala Bidang Rehabilitasi Dan Rekonstruksi	Pembina – IV/a	1
4	Kepala Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan	Penata Tk.I – III/d	1
5	Kepala Bidang Penanganan Darurat Dan Logistik	Penata Tk.I – III/d	1
6	Kepala Sub Bagian Keuangan	Penata Tk.I – III/d	1
7	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Penata Tk.I – III/d	1
8	Kepala Sub Bagian Program Dan Dan Evaluasi	Penata Tk.I – III/d	1
9	Kepala Seksi Pencegahan	Penata - III/c	1
10	Kepala Seksi Kesiapsiagaan	Penata Tk. I - III/d	1
11	Kepala Seksi Kedaruratan	Penata Tk. I - III/d	1
12	Kepala Seksi Logistik dan peralatan	Penata - III/c	1
13	Kepala Seksi Rehabilitasi	-	0
14	Kepala Seksi Rekonstruksi	Penata - III/c	1

15	Analisis Mitigasi Bencana	Penata Muda – III/a	1
16	Penyuluh Bencana	Penata Muda – III/a	1
17	Bendahara Pengeluaran	Penata Muda Tk.I – III/b	1
18	Verifikator Keuangan	Penata Muda Tk.I – III/b	1
19	Teknik Tata Bangunan Dan	Pengatur Tk.I - II/d	2
20	Teknik Tata Bangunan Dan	Pengatur – II/c	1
21	Penata Laksana Bangunan Gedung Dan Kawasan Permukiman Terampil	Pengatur – II/c	2
22	Penata Layanan Operasional	IX	2
23	Operator Layanan Operasional	V	3
Jumlah			27 orang

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari jumlah 27 orang ASN, golongan IV berjumlah 3 orang, golongan III berjumlah 14 orang dan golongan II berjumlah 5 orang dan 5 orang PPPK. Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel I.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin pada BPBD Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		L	P	
1	SMA	4	0	4
2	D-3	6	4	10
3	S1	10	3	13
4	S2	0	0	0
TOTAL		20	7	27

Dari jumlah tersebut pegawai yang berpendidikan S1 berjumlah 13 orang, D3 berjumlah 10 orang dan SMA berjumlah 4 orang. Susunan kepegawaian pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel I.3 Daftar Normatif PNS pada BPBD Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025

NO	NAMA	PANGKAT/GOL.	PENDIDIKAN
1	SAMUEL BORO, ST	PEMBINA UTAMA MUDA - IV/c	S1
2	FRANS NICOLAS BORA	PEMBINA -IV/a	SMA
3	PANKRASIUS APIN, S.Kom	PEMBINA -IV/a	S1
4	YUSTINUS SUDI LERO, A.Md	PENATA Tk.I- III/d	D3
5	BROMLEY RUDOLF TAKO, S.IP	PENATA Tk.I- III/d	S1
6	DOMINGGUS PANDANGO,A.Md	PENATA Tk.I- III/d	D3

7	NAEMA HELENA ZOGARA, S.Pt	PENATA Tk.I- III/d	S1
8	JEFRI DANGGA LOMA, S.Pt	PENATA Tk.I- III/d	S1
9	BINTARI SETYORINI, SE	PENATA Tk.I- III/d	S1
10	OBED SESI MILLA, ST	PENATA Tk.I- III/d	S1
11	JANUARIUS NIGA, A.Md	PENATA - III/c	D3
12	MATEUS PAULUS KAKA, S.Pt	PENATA - III/c	S1
13	MATHIUS UMBU TARA NAPU, SE	PENATA - III/c	S1
14	MARGARETHA TANGGU SOLO, A.Md	PENATA MUDA	D3
15	OLFIANA DAPATAKA, A.Md	PENATA MUDA	D3
16	VICTOR BARNABAS BULU, S.T	PENATA MUDA -	S1
17	MELKIANUS ERIKH BILI, S.T	PENATA MUDA -	S1
18	MARIA REGINA LONGA TURU, A.Md	PENGATUR Tk.I –	D3
19	SOLEMAN JOHANIS FRARE, A.Md	PENGATUR Tk.I –	D3
20	GERSON BILI TANGGELA NDAMANUNA,	PENGATUR – II/c	D3
21	RITCHEL GIOVANNI FERNANDES, A.Md. T	PENGATUR – II/c	D3
22	JENI SUSANTI BONU KULLA, A.Md. T	PENGATUR – II/c	D3
23	PAULINA INA KII, SP	IX	S1
24	MAYORET ADRIAN TAEKO, S.Pd	IX	S1
25	MAXIMILIANUS UMBU DETA	V	SMA
26	MELKIANUS UMBU KALEKA	V	S1
27	YOHANES KAKO LODO	V	S1

Guna mendukung tugas dan fungsi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya memiliki sarana dan prasarana yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1.4 Data Aset BPBD Kabupaten Sumba Barat Daya

No	NAMA BARANG	MERK/TYPE	TAHUN PEMBELIAN	JUMLAH	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1.	Station Wagon	IsusuTouring / TBR 54 F	2009	1	Baik
2.	Sepeda Motor	Honda / GL 160 D	2010	1	Baik
3.	Sepeda Motor	Honda / GL 160 D	2010	1	Baik
4.	Lemari Kayu	Lokal / Lokal	2010	2	Baik
5.	Meja 1/2 Biro	Lokal / 1/2 Biro	2010	6	Baik
6.	Meja Kerja Pejabat Eselon II	lokal / lokal	2010	1	Baik
7.	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	lokal / busa	2010	1	Baik
8.	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	lokal / busa	2010	1	Baik
9.	Kursi Biasa	lokal / lokal	2010	2	Baik
10.	Kursi Biasa	lokal / lokal	2010	1	Baik
11.	Kursi Biasa	lokal / lokal	2010	2	Baik
12.	Kursi Biasa	lokal / lokal	2010	1	Baik
13.	Sepeda Motor	HONDA / GL15A1D M/T	2011	1	Baik
14.	Lemari Kayu	Lokal / Lokal	2011	1	Baik
15.	Meja 1/2 Biro	Lokal / 1/2 Biro	2011	2	Baik
16.	Kursi Putar	Alvi / Rakuda	2011	1	Baik
17.	alat komunikasi radio ssb lainnya (dst)	Kenwood / Kenwood	2011	9	Baik
18.	alat komunikasi radio ssb lainnya (dst)	Kenwod / Kenwood	2011	1	Baik
19.	Wireless Amplifier	Tens / KE-8700	2011	1	Baik
20.	Kursi Lipat	Chitosa / Chitosa	2011	30	Baik
21.	Water Treatment (Mesin Proses)	Mitsubhisi / MS-N10PM	2012	1	Baik

22.	Station Wagon	ISUZU / TF585HD MT	2012	1	Baik
23.	Sepeda Motor	KAWASAKI / LX 150 C	2012	1	Baik
24.	Sepeda Motor	KAWASAKI / LX 150 C	2012	1	Baik
25.	Sepeda Motor	Honda / NF11B2D1 M/T	2012	1	Baik
26.	Lemari Kayu	Lokal / Lokal	2012	3	Baik
27.	Meja Kerja Kayu	Lokal / Lokal	2012	5	Baik
28.	Handy Talky (HT)	VEV / VEV	2012	2	Baik
29.	alat komunikasi telephone lainnya (dst)	Rig HT / Kenwood/TM	2012	1	Baik
30.	Unit TranceiverSsbPortable	ICOM / IC	2012	1	Baik
31.	Tenda	Lokal / Lokal	2012	1	Baik
32.	Tenda	Lokal / Lokal	2012	3	Baik
33.	Tenda	Lokal / Lokal	2012	1	Baik
34.	Tenda	Lokal / Lokal	2012	5	Baik
35.	Tenda	Lokal / Lokal	2012	1	Baik
36.	Genset	Honda / TP3850SP	2012	2	Baik
37.	Kursi Kayu	-	2012	5	Baik
38.	Truck + Attachment	ISUZU / NKR 71 HD	2013	1	Baik
39.	alat angkutan apung tak bermotor untuk barang lainnya (dst)	PARUSUT / Porta Bote	2013	1	Baik
40.	Perahu Penumpang	SELINGER / Parsun	2013	1	Baik
41.	A.C. Window	SHARP / AU-A18NCY	2013	2	Baik
42.	Gordyin/Kray	Lokal / Lokal	2013	1	Baik
43.	Tenda	SELINGER / SELINGER	2013	1	Baik
44.	Bangunan Menara/Bak Penampung/Reservoir Air Minum	-	2013	1	Baik
45.	Rak Kayu	Lokal / Lokal	2014	2	Baik
46.	Papan Visual/Papan Nama	Lokal / Lokal	2014	1	Baik
47.	Papan Pengumuman	Lokal / Lokal	2014	1	Baik
48.	A.C. Window	SHARP / AU-A18NCY	2014	1	Baik
49.	Peralatan Personal Komputer lainnya	ICA / CE1200	2014	4	Baik
50.	Station Wagon	ISUZU / SMART 25 SF	2015	1	Baik
51.	PickUp	PICK UP LOW DESK / ISUZU	2015	1	Baik
52.	PickUp	PICK UP LOW DESK / ISUZU	2015	1	Baik
53.	Sepeda Motor	Yamaha JupiterZ FI / UE11	2015	1	Baik
54.	Global Positioning System	Garmin / Oregon 650	2015	1	Baik
55.	Meja Kerja Kayu	Lokal / Lokal	2015	5	Baik
56.	Meja Kerja Kayu	Lokal / Lokal	2015	5	Baik
57.	Sofa	LOKAL / LOKAL	2015	1	Baik
58.	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	lokal / lokal	2015	2	Baik
59.	Peralatan Personal Komputer lainnya	ICA CE 1200 / CE 1200	2015	3	Baik
60.	Kursi Rapat	CHITOSE	2015	20	Baik
61.	Meja Kerja Kayu	lokal / lokal	2016	5	Baik
62.	Meja Rapat	lokal / lokal	2016	2	Baik
63.	Kursi Lipat	Bigstar / Bigstar	2016	24	Baik
64.	Sofa	lokal / lokal	2016	1	Baik
65.	A.C. Window	Sharp / R32ECO	2016	3	Baik
66.	Alat Dapur lainnya	Miyako	2016	4	Baik
67.	Televisi	Panasonic / TH-32D302G	2016	1	Baik
68.	peralatan antena shf/parabola lainnya (dst)	Philsat / PL-101	2016	1	Baik

69.	Lap Top	Thosiba / Satellite	2016	4	Baik
70.	Peralatan Personal Komputer lainnya	ICA / CE 1200	2016	3	Baik
71.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	-	2019	1	Baik
72.	Gergaji Chain Saw	STIHL / MS 070	2020	1	Baik
73.	Mesin Pompa air PMK	TaroTWP80 / Gx _ 160	2020	1	Baik
74.	Tali KamantelStatic	Standard / Standard	2021	2	Baik
75.	Tandu Lipat	Fold By 8 / Fold By 8	2021	1	Baik
76.	SpeedBoat / Motor Tempel	Tohatsu / 18 PK	2021	2	Baik
77.	Alat Pemadam/Portable	TONATA ABC POWDER / 3 KG	2021	2	Baik
78.	Alat Studio Lainnya	Canon EOS 1200D / Digital Single-Lens Reflex AF/AE Camera	2021	1	Baik
79.	Mesin Potong Jerami	Noqiwa / Model : BG-328	2021	1	Baik
80.	Target Drone (Simulasi Pesawat Sasaran Tembak Udara)	DJI Panthom 4 Pro V2, Ultra HD 4K 60fps, 20 MP / DJI DJIPanthom 4 Pro V2, Ultra HD 4K 60fps, 20 MP	2021	1	Baik
81.	Lap Top	Acer Extensa 215-22, 1 TB, WIN 10, 8 GB / AMD AthlonSilver 3050U Turbo Bost,8 GB DDR4,HDD1T	2021	1	Baik
82.	Lap Top	ASUS Intel i5, LCD 14 FHD WV, DDR4 4 G, 256G SSD / ASUS Intel i5, LCD 14 FHD WV, DDR4 4 G, 256G SSD	2021	1	Baik
83.	Lap Top	ASUS Intel i5, LCD 14 FHD WV, DDR4 4 G, 256G SSD / ASUS Intel i5, LCD 14 FHD WV, DDR4 4 G, 256G SSD	2021	1	Baik
84.	Tandu	Standard / LoadBearing: 270 Kg, Unfoldedsized : 219x64x18	2021	1	Baik
85.	rambu tidak bersuar lainnya (dst)	Pipa Besi (SNI), Plat Aluminium, Rangka Besi / Pipa Besi (SNI), Plat Aluminium, Rangka Besi	2021	25	Baik
86.	Senter	Two Battery / Two Battery	2021	3	Baik
87.	Senter	Two Battery / Two Battery	2021	3	Baik
88.	Rak Kayu	LOKAL / LOKAL	2022	1	Baik
89.	Tabung 02	SCUBA DIVE / 6061 - T6	2022	3	Baik
90.	Rambu-rambu Larangan	LOKAL / LOKAL	2022	12	Baik
91.	Rambu Peringatan Dini Kebencanaan	Pipa Besi (SNI), Plat Aluminium, Rangka Besi / Pipa Besi (SNI), Plat Aluminium, Rangka Besi	2023	14	Baik
92.	Mesin Gurinda	Makita - 100mm	2023	1	Baik
93.	Travo Las Listrik	120A (900 watt)	2023	1	Baik
94.	Bor Listrik	Daya Listrik 350 Watt, Kecepatan 0-3000 rpm	2023	1	Baik
95.	LCD Projector/Infocus	ACER / BS-021	2024	1	Baik
96.	Personal Computer	DESKTOP PC / CORE I5	2024	2	Baik
97.	Lap Top	LENOVO / INTEL I7-13620H	2024	1	Baik
98.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	CANON INK TANK / G1010	2024	3	Baik
99.	External/ PortableHardisk	HDD EXTERNAL / 2TB	2024	2	Baik
100.	Paket CCTV 5MP 8 Channel	Paket CCTV 5MP 8 Channel	2025	1	Baik

101.	Laptop	Intel Core i5 - 7200	2025	1	Baik
102.	Laptop	Intel Core i7 - 7700HQ	2025	1	Baik
103.	Scanner	Lide 120	2025	1	Baik
104.	Tempat Sampah Organik dan Non OrganiK		2025	1	Baik
105.	Mesin Absensi Fingerprint		2025	1	Baik

Sumber pembiayaan yang dikelola oleh Inspektorat Kabupaten Sumba Barat Daya bersumber pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumba Barat Daya. Anggaran 2025 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 1.5 Anggaran Tahun 2025
BPBD Kabupaten Sumba Barat Daya**

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	%
PENDAPATAN	-	-	-
BELANJA OPERASI	2.723.830.974	2.433.105.964	89,50
Belanja Pegawai	1.496.342.178	1.373.126.429	89,33
Belanja Barang dan Jasa	1.227.488.796	1.059.979.535	86,35
BELANJA MODAL	45.000.000	45.000.000	100
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	45.000.000	45.000.000	100
JUMLAH BELANJA	2.768.830.974	2.478.105.964	89,50
SURPLUS (DEFISIT)	-	-	-
PEMBIAYAAN NETTO	-	-	-

BAB II

PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KERJA

Perencanaan Strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya. Perencanaan Strategis merupakan proses sistimatis yang mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan yang berkelanjutan dari pengambilan keputusan yang beresiko tentang masa depan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya telah menyusun rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu dua tahun, yaitu periode 2025–2029 dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin terjadi. RENSTRA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati Sumba Barat Daya yang penyusunannya berpedoman pada RPD Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025-2029. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran, tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya.

Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator kinerja. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis.

Secara umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya dapat melaksanakan tugas dan fungsi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPD Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025-2029 telah ditetapkan 1 sasaran dengan 2 indikator kinerja (*out comes*), sebagaimana tertuang pada Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025-2029.

A. RENCANA STRATEGIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025 - 2029 merupakan penjabaran lebih lanjut dari visi, misi dan agenda Kepala Daerah. Penyusunan RENSTRA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025-2029 ini tentunya tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan pada periode waktu sebelumnya dari berbagai rangkaian dan periodisasi kepemimpinan daerah sesuai dengan penekanan dan tema yang didasarkan pada berbagai perspektif, kondisi dan perkembangan pembangunan saat itu. Untuk itulah maka penyusunan RPD Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025-2029 disusun dengan strategi keberlanjutan yaitu dengan prinsip tetap memperhatikan program-program pembangunan yang telah dilaksanakan pada periode kepemimpinan sebelumnya yang telah memberikan sejumlah hasil dan capaian pembangunan kesejahteraan bagi masyarakat :

1. Pernyataan Visi dan Misi

a. Visi

Sesuai amanat Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 150 ayat 3 (tiga) huruf b bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu lima tahun merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah. Mengacu pada Visi Kabupaten Sumba Barat Daya yaitu **“MEMBANGUN DESA MENATA KOTA”** dan Misi ke 6 Kabupaten Sumba Barat Daya yaitu Mewujudkan Kelestarian Lingkungan hidup.

Hal ini sejalan dengan Prioritas Program yang ingin dicapai oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya antara lain :

a) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA

Kegiatan :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

b) PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA

Kegiatan :

1. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota;
2. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana;
3. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana.

b. Misi

Berdasarkan Visi Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya tersebut, maka misi yang diemban oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Mewujudkan Kelestarian Lingkungan hidup.

2. Tujuan dan Sasarana.

Tujuan

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai selama 2 (dua) tahun kedepan sebagai penjabaran visi dan misi Kabupaten Sumba Barat Daya yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya mewujudkan visi dan misi.

Tujuan yang ingin dicapai melalui pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Sumba Barat Daya adalah meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan sistem informasi daerah.

- b. Sasaran
Sasaran merupakan fokus dari tujuan, maka sasaran dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya adalah sebagai berikut :
 - 1. Menurunkan Resiko Bencana"**Meningkatnya Ketangguhan Daerah dalam Penanggulangan Bencana"**

Program Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya adalah sebagai berikut :

- a. Program - Program Prioritas :
 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
Kegiatan :
 - 1) Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota;
 - 2) Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana;
 - 3) Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana.

- b. Program - Program Penunjang :
 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA
Kegiatan :
 - 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - 3) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - 4) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - 5) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

B. STRUKTUR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025

Struktur program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya sasaran Inspektorat Kabupaten Sumba Barat Daya tahun 2025 maupun program dan kegiatan pendukung sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.1 Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan terkait langsung dengan Pencapaian Sasaran Tahun 2025

PROGRAM/ KEGIATAN/	PAGU APBD Perubahan (Rp)	Jumlah Belanja (Rp)	Realsiasi (%)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	1.893.950.074,00	1.760.031.528,00	92,92%
Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	27.634.250,00	27.634.250,00	100%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.543.312.178,00	1.418.196.429,00	91,89%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	115.173.850,00	114.889.715,00	99,75%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	67.922.496,00	67.712.424,00	99,69%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	139.907.300,00	131.598.710,00	94,06%
PROGRAM PENANGGULANGAN	874.880.900,00	718.074.436,00	82,07%
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota	69.858.000,00	0,00	0%
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	415.912.900,00	331.961.478,00	79,81%
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	285.766.500,00	283.710.244,00	99,28%
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	103.343.500,00	102.402.714,00	99,08%

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kerjanya. Adapun Perjanjian Kinerja Inspektur Kabupaten Sumba Barat Daya yang merepresentasikan kinerja instansi dengan Bapak Bupati Sumba Barat Daya sebagai berikut :

**Tabel II.2 Perjanjian Kinerja BPBD
Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dengan mengedepankan pembangunan berwawasan lingkungan	Prosentase menurunnya risiko bencana	61,18%

Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut :

Tabel II.3. Dukungan Anggaran untuk mencapai Sasaran Strategis

PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	1.893.950.074,00
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	27.634.250,00
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.543.312.178,00
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	115.173.850,00
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	67.922.496,00
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	139.907.300,00
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	874.880.900,00
Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota	69.858.000,00
Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	415.912.900,00
Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	285.766.500,00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas sebagai satu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan, melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi instansi yang bersangkutan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya selaku pengembanamanah masyarakat Kabupaten Sumba Barat Daya untuk melaksanakan kewajiban dalam bidang pengawasan, dalam penyajian Laporan Kinerja Pemerintah dibuat sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis, Laporan Kinerja dan tata cara review Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen RPD Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025-2029. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai program, sasaran, tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya.

Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator kinerja. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis.

Secara umum Inspektorat Kabupaten Sumba Barat Daya telah dapat melaksanakan tugas dan fungsi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPD Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025-2029. Telah ditetapkan 2 sasaran dengan 1 indikator kinerja(*outcomes*) sebagaimana tertuang pada Rencana Strategis

Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut diatas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut :

Tabel.3.Dukungan Anggaran untuk mencapai Sasaran Strategis

PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	1.893.950.074
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	27.634.250
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.543.312.178
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	115.173.850
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	67.922.496
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	139.907.300
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	874.880.900
Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota	69.858.000
Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	415.912.900
Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	285.766.500

3.1. CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya melaksanakan pengukuran kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun indikator kinerja sasaran strategis organisasi yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025.

Berikut disampaikan cara pengukuran capaian kinerja yang dikaitkan dengan realisasi dalam pencapaian dan targetnya, serta skala pengukuran dan predikat kinerja sebagai berikut:

Kondisi capaian kinerja yang menunjukkan semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian yang semakin baik :

$$\% \text{Capaian kinerja} = \frac{\text{Realisasi kinerja}}{\text{Target kinerja}} \times 100\%$$

Sedangkan skala pengukuran dan predikat kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	91 ≤ 100	Sangat Tinggi	Hijau Tua
2.	76 ≤ 90	Tinggi	Hijau Muda
3.	66 ≤ 75	Sedang	Kuning Tua
4.	51 ≤ 65	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

Sumber: Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Tabel III. 2 Capaian Kinerja Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2024	TAHUN 2025			KRITERIA/KODE
					TARGET	REALISASI	%	
1	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dengan mengedepankan pembangunan berwawasan lingkungan	Menurunnya Risiko Bencana	Prosentase	83,06	100	89,50	89,50%	Tinggi

Analisa sasaran kinerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan laporan hasil pemantauan atas tindak lanjut Semester I Tahun Anggaran 2025 pada Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya persentase Capaian tindak lanjut sebesar 89,50%.

2. Capaian ini telah memenuhi target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya, Tahun 2025 dengan target minimal sebesar 80%.
3. Peningkatan prosentase tindak lanjut rekomendasi kedepannya membutuhkan pelayanan lebih maksimal.

3.2. Faktor Pendukung, Hambatan dan Rekomendasi Perbaikan

Dalam pelaksanaan kegiatan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya tahun

2025, terdapat beberapa upaya pencapaian, hambatan serta rekomendasi perbaikan kedepannya pada kegiatan di Inspektorat Kabupaten Sumba Barat Daya sebagai berikut :

1. Faktor pendukung
 - a) Adanya komitmen pimpinan dan pegawai melaksanakan tugas dan fungsi dengan sungguh-sungguh sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
 - b) Adanya SDM sesuai tupoksi;
 - c) Adanya komitmen yang tinggi dari Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya untuk mewujudkan *Good Governance*.
2. Hambatan
 - a) Terbatasnya jumlah dan kualitas SDM yang belum memadai dengan latar belakang pendidikan yang beragam sehingga pelaksanaan tugas kurang optimal.
 - b) Sarana dan Prasarana pendukung yang kurang memadai.
 - c) Minimnya anggaran yang tersedia guna memaksimalkan terhadap Pelayanan kebencanaan.
3. Rekomendasi
 - a) Berkoordinasi dengan BKPSDM Kabupaten Sumba Barat Daya terkait pemenuhan SDM APIP.
 - b) Adanya Komitmen Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya untuk mendorong penguatan APIP mulai dari aspek anggaran, sumber daya dan kelembagaannya.

3.3. REALISASI ANGGARAN

Anggaran yang disediakan pada Tahun 2025 untuk program dan kegiatan yang dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025.

Dengan nilai belanja seluruhnya sebesar Rp.4.041.319.770,00 dengan realisasi anggaran mencapai Rp 3.583.085.499,00 atau dengan serapan APBD mencapai 88,66%.

Capaian bagian belanja sebesar 88,66% terinci untuk masing-masing komponen belanja sebagai berikut :

Tabel III.3. Realisasi Anggaran Tahun 2025

No.	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
		(Rp)	(Rp)
1	BELANJA PEGAWAI	2.768.830.97	2.478.105.96
2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.227.488.79	1.059.979.53
3	BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	45.000.000	45.000.000
TOTAL		4.041.319.770	3.583.085.499

untuk mendorong pencapaian program dan kegiatan, sasaran, tujuan, visi dan misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2025, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Badan Penanggulangan Kabupaten Sumba Barat Daya mengelola anggaran belanja dengan sumber dana APBD Tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut.

BAB IV

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan di lingkup Inspektorat kabupaten Sumba Barat Daya. LKIP juga dimaksudkan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*.

Keberhasilan pelaksanaan dari program/kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya sangat tergantung pada komitmen bersama antara Pejabat dan Aparatur yang didukung dengan etos kerja yang tinggi dan dengan disiplin ilmu sesuai dengan tugas yang diemban, serta mampu melaksanakan tugas sebagai abdi negara dan abdi masyarakat yang baik guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan dibarengi oleh suatu perwujudan aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa serta bertanggungjawab dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam pelaksanaan program/kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya.

Berdasarkan hasil evaluasi pencapaian sasaran strategic dapat diperoleh hasil evaluasi kinerja kegiatan yang secara nyata menunjukkan bahwa dari 1 indikator sasaran kinerja kegiatan Tahun 2025 pada Inspektorat Kabupaten Sumba Barat Daya dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Capaian prosentase tindak lanjut hasil 89,50% atau mendapat predikat baik.

dengan total Serapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Rp. 3.583.085.499,00
dari jumlah anggaran yang ditetapkan. Rp. 4.041.319.770,00 atau sebesar 88,66%.

Dengan demikian disimpulkan capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Sumba Barat Daya pada Tahun 2025 dapat dikatakan sudah sesuai target dengan interpretasi **BAIK**.

Terhadap indikator yang capaiannya belum mencapai target seperti yang diharapkan dapat dipergunakan sebagai acuan untuk melakukan perbaikan atau pembenahan yang komprehensif baik dari proses perencanaan maupun pelaksanaannya sehingga memberikan nilai yang lebih baik pada tahun berikutnya.

Akhirnya, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target beberapa indikator yang dicantumkan dalam Renstra Inspektorat Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025-2029, khususnya untuk Tahun 2025 cukup sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami sadari diakibatkan oleh beberapa kelemahan baik internal maupun kurang optimalnya dukungan atau kemampuan daerah untuk membiayai sesuai dengan skala prioritas. Untuk tercapainya sasaran sangat

diperlukan kemampuan internal serta komitmen Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya dalam Bidang Kebencanaan.

4.2. SARAN

Dalam upaya pelaksanaan program yang ada dalam menunjang kelancaran pelaksanaan dibidang Kebencanaan, maka Program Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai pelaksanaan Urusan Pemerintahan sangatlah diperlukan, sehingga dapat adanya kelemahan sistem pelayanan kebencanaan dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berdampak kepada korban bencana.

Untuk itu secara kuantitas diperlukan adanya penambahan SDM aparatur dibidang kebencanaan dengan kompetensi yang memadai dan peningkatan kualitas SDM dalam teknis kebencanaan. Dalam hal ini diperlukan adanya komitmen yang kuat dari semua pihak, khususnya Pimpinan Daerah, terkait kebijakan di bidang kepegawaian, baik dalam perekrutan dan pengembangan sumber daya manusia yang telah ada saat ini. Tentunya juga ditunjang dengan saran dan prasarana yang memadai dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

Demikian LKIP ini dibuat guna memberikan kontribusi yang berarti bagi pihak- pihak yang berkepentingan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan pelayanan kemasyarakatan dan perbaikan dan peningkatan di tahun mendatang.

